



Perspektif:

Kajian Pemerintahan & Kesejahteraan Sosial

Nomor 1 Volume 8

ISSN: 2655-4364



The article is published at <https://jurnal.uic.ac.id/perspektif>

Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur

Agus Kurniadi¹, Wiara Angraeni², Saiful Koda³

^{1,2,3}Universitas Ibnu Chaldun

Correspondent Email: aguskurniadi876@gmail.com

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus : Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur). Dalam Penelitian ini Terdapat 4 (Empat) Variabel yang sering berkaitan dan mempengaruhi serta memiliki korelasi, Dimana 3 (Tiga) Variabel adalah bersifat eksdogen yakni Pemerintahan, Desa, Kesejahteraan, Masyarakat Nelayan. Serta 2 (Dua) Variabel Endogen yakni Peran Kerja dan juga Kinerja. Adapun sampel penelitian ini adalah semua pegawai Desa Alor Besar dan Masyarakat Nelayan. Teknik Analisis Data menggunakan Pencatatan Data, Penyajian Data, Verifikasi Data, Hasil Penelitian, Uji Hipotesis menunjukkan semua variabel berpengaruh positif. Hal tersebut di tunjukkan bahwa faktor-faktor mempengaruhi kinerja antara lain gaya peran dari Pemerintah Desa dan juga Kepentingan yang harus diutamakan dan harus mengutamakan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan.

Kata kunci: Pemerintah, Desa, Kesejahteraan, Masyarakat, Peran Kerja dan Juga Kinerja.

Abstract

This Study aims to determine the role of village government in improving the welfare of fishing communities (Case Study : Alor Besar Village), North West Alor District, Alor Regency, East Nusa Tenggara Province. This Study consists of four variables that are often related, influencing, and correlated. Three of these variables are dependent variables : work roles and performance, The sample for this Study was all employees of Alor Besar Village and the Fishing community. Data Analysis Techniques used data Recording, Data Presentation, and Data Verification. The Results of the hypothesis testing study indicate that all variables have a positive effect. This indicates that factors influencing performance include the role style of the village government and the importance of prioritizing the welfare of the Fishing community.

Keywords: Government, Village, Welfare, Fishing Community, Work roles, and performance.

Accepted Date: 15 Mei 2026

Publish Date: 15 Juni 2026

Pendahuluan

Tujuan menciptakan suatu Negara Adalah untuk kesejahteraan bagi rakyatnya. Dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pelayanan sosial menyebutkan dalam pasal 1 bahwa penyelenggaraan pelayanan sosial dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan yang terpadu, berkesinambungan, dan tertera oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam rangka, bentuk diartikan sebagai upaya proaktif. Pelayanan sosial yang memenuhi kebutuhan dasar seluruh warga negara ini termasuk rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial mengacu pada keadaan dimana kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat terpenuhi dan mereka mampu berkembang dan menjalani kehidupan yang bermartabat serta memenuhi tanggung jawab sosial mereka.

Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan Indonesia. Dengan disahkannya undang-undang Nomor 6 tentang Desa Tahun 2014, praktik tata kelola menjadi diatur karena desa mempunyai hak tradisionalnya sendiri untuk mengelola dan mengatur pembangunan desa. Dengan kata lain pelaksanaan otonomi desa memiliki konsekuensi logis berupa terselenggaranya pemerintahan desa dan pembangunan yang berbasis pada tata kelola pemerintahan yang baik.

Desa diberikan hak dan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan pemerintahannya sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Daerah Otonomi berhak mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri demi memajukan kesejahteraan umum. Selain mengembangkan pemerintahan daerah sendiri, pemerintah pusat mendukung pemerintah sendiri dan peran serta aktif masyarakat desa dalam pembangunan desa.

Salah satu tujuan pembangunan pemerintah adalah meningkatkan standar hidup di daerah pedesaan. Untuk mencapai tujuan ini, berbagai bidang terus dikembangkan yang dapat mengoptimalkan peran pemerintah desa dalam meningkatkan potensi desa berupa kelembagaan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pertama-tama perlu diidentifikasi ketiga kemungkinan tersebut secara kualitatif pada tahap awal.

Kesejahteraan masyarakat berbading lurus dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dari tingkat pendapatan penduduknya. Dalam hal ini berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Di wilayah pesisir, kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya laut tidak dapat dipisahkan. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah pesisir berprofesi sebagai nelayan dan menggantungkan hidup pada sektor perikanan.

Peran Pemerintah desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan tersorot pada pentingnya pemerintah desa dalam memainkan peran kunci dalam meningkatkan standar hidup di desa terutama pada penduduk nelayan wilayah pesisir. Sebagian besar desa nelayan di Indonesia hidup dengan keadaan ekonomi marjinal. Mereka menghadapi tantangan seperti akses yang buruk terhadap modal, infrastruktur yang terbatas, dan rendahnya lapangan kerja, yang mengakibatkan tingginya ketergantungan pada hasil laut. Situasi ini membuat masyarakat nelayan rentan terhadap perubahan kondisi cuaca, fluktuasi harga ikan, dan ancaman terhadap ekosistem laut.

Pemerintah desa sebagai yang terdepan untuk langsung bersentuhan dengan masyarakat lokal dan mempunyai strategi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui berbagai program pembangunan desa berkelanjutan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan pemerintah desa diharapkan mampu mengembangkan kebijakan yang mendorong kemandirian ekonomi melalui pelatihan lokasi, penyediaan infrastruktur dan memberikan dukungan terkait fasilitasi akses pasar dan permodalan. Selain itu pemerintah desa harus memulai dalam artian mendorong program pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Selain daripada itu peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan menitik beratkan pada upaya pengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir pantai yang pada umumnya bergantung secara ekonomi pada sektor perikanan .

Melihat pada sektor pemerintah dan kedudukan yang harus di ambil dalam tindakan pengupayaan. Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan untuk melihat sejauh mana permasalahan-permasalahan yang terjadi di Desa Alor Besar tersebut dan mengadopsikan sebuah catatan sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Adapun alasan Desa Alor Besar sebagai tempat pengambilan survey yaitu :

1. Desa Alor Besar merupakan Desa yang 70% penduduk adalah nelayan dan 20% penduduknya adalah petani, 10% Penduduk adalah pegawai negeri sipil. Oleh karena itu pemerintah desa perlu memperhatikan masyarakat yang bergantung pada hidup sepenuhnya yaitu nelayan dalam bentuk memberikan pemahaman dan juga pendidikan tentang penggunaan alat tangkap modern yang diberikan desa dalam bentuk bantuan pemerintah.
2. Tidak jauh dari tempat tinggal yaitu Desa Alor Besar masih kurangnya pendapatan dari para nelayan yang dimana masyarakat berupaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan pemerintah desa masih belum memecahkan masalah yang telah terjadi di desa Alor Besar tersebut.

Tinjauan Literatur

1. Peran

Kontes peran dalam kamus bahasa adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya. Dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat.

Soejono Soekanto, (2010: 212) berpendapat bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dengan kedudukannya tersebut seseorang menjalankan suatu perananl. Dari kesimpulan dari Soejono Soekanto bahwa peran merupakan hak dan kewajiban dari suatu kedudukan seseorang dan berfungsi sebagai tugas yang yang harusnya dilakukan dan merupakan hal-hal yang sepantasnya diperoleh dari kepemilikan tugasnya dan kedua hal tersebut harus di jalankan secara seimbang agar bisa dikatakan telah melaksanakan perannya.

Peran juga diartikan sebagai kemampuan seseorang yang diharapkan dapat membawa perubahan dan harapan, yang mengarah pada kemajuan, dan dianggap sebagai tolak ukur kepemimpinan, meskipun tidak selalu memenuhi harapan, peran dapat diharapkan melaksanakan tugas yang diberikan kinerja terbaiknya saat melaksanakan tugas pekerjaannya.

2. Pemerintah Desa

Desa adalah suatu wilayah yang disebut dengan nama lain, dengan sejarah yang sudah ditemukan yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat. Hak asal usul, dan Hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 pengaturannya berdasarkan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. Pemerintah desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah kecamatan, desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Desa merupakan sub-sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

3. Peran Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus mengambil alih peran dari masing-masing pemerintahan desa. Pemerintah desa mempunyai berbagai tugas dalam menyelenggarakan pemerintah desa. Memerankan tugas pemerintah desa yang di maksud ada beberapa peran pemerintah desa sebagai pelaksana yaitu :

1. Peran pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini, pemerintah desa menggerakkan warga untuk turut serta dalam musyawarah dan mencapai kesepakatan pembangunan.
2. Peran pemerintah desa dalam mendorong peran masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.
3. Peran pemerintah desa dalam memperkuat masyarakat desa dalam aspek pemberdayaan masyarakat

4. Masyarakat

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut "*society*" asal kata "*society*" yang berarti kawan. Adapun kata "masyarakat" berasal dari bahasa arab yaitu "*syirk*" yang berarti bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya interaksi. Adanyab saling bergaul itu tentu karena bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain. Artinya lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial maupun ikatan-ikatan kasih sayang yang erat.

5. Nelayan

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan (undang-undang No. 31 Tahun 2004). Menurut departemen kelautan dan perikanan (2002) nelayan orang yang mata

pencariannya melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat penangkapan ikan dalam perahu dan mereka dikategorikan sebagai nelayan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini biasanya digunakan untuk mengamati situasi objek yang ada di lapangan, dengan penelitian ini berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan dengan teliti, sementara analisis data bersifat induktif atau kualitatif yang lebih menekankan pada pemahaman makna kesejahteraan menurut Sugiyono (2018, hlm. 2) jenis penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati objek yang relevan dalam waktu yang telah disepakati, untuk memahami secara mendalam peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di desa alor besar kecamatan alor barat laut kabupaten alor.

Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum dan Hasil Penelitian

Asal mula pemberian nama Desa Alor Besar bermula dari sejarah kerajaan bunga bali yang dipimpin oleh Raja Kawiha Tuli yang letak kerajaannya di wilayah yang bernama Alor Besar dan diberikan nama sesuai dengan nama tempat letak kerajaan Bunga Bali tersebut dan pada awal masuknya penjajahan kemudian perampasan kekuasaan oleh sekutu dan mulailah kerja sama tanpa adanya melihat dari kerjaan mana saja. Kemudian dibagilah wilayah yang diberikan kekuasaan untuk memimpin suatu desa sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia maka disitulah awal mula dari pembagian batas wilayah dan juga pemimpin desa pertama.

1. Kasar panggo tahun 1971-1978 Desa Gaya Baru
2. Bakar Mou tahun 1978-1983 Desa Gaya Baru
3. Pelipus Bukang tahun 1983-1988 Desa Alor Besar
4. Umar Ismail tahun 1988-1993 Desa Alor Besar
5. Abdul Rasyid Watang tahun 1993-2002 Desa Alor Besar
6. Idris Karim tahun 2002-2007 Desa Alor Besar Periode 1
7. Idris Karim tahun 2007-2013 Desa Alor Besar Periode 2
8. Ibrahim Hadji tahun 2013-2019 Desa Alor Besar
9. Sirahudin Ali, S. Sd. I tahun 2019-2025 Desa Alor Besar

Secara umum kondisi desa alor besar dalam geografis sangat memiliki peluang yang sangat baik di bidang perikanan atau nelayan. Baik itu hasil tangkapan laut maupun wilayah yang sudah ditetapkan sebagai desa destinasi wisata yang belum di manfaatkan oleh pemerintah desa dalam upaya membangun kesejahteraan masyarakat nelayan. Desa alor besar memiliki luas wilayah 23.720 hektar dengan jumlah kependudukan sebanyak 1.717 jiwa dan 460 KK merupakan warga desa alor besar yang telah menetap dan juga menjadi warga asli desa alor besar namun dalam bidang pendidikan masih sangat kecil angkanya yang dihitung yaitu 6 sarjana dan 1.895 tamatan SD sederajat. Oleh karena itu dengan perkembangan penduduk yang semakin meningkat meningkat setiap tahun di pandang perlu adanya pembangunan dalam sektor nelayan yang perlu ditingkatkan lagi.

Desa alor besar merupakan desa yang masih berkembang dalam statistic desa. Desa alor besar merupakan desa destinasi dan juga semua penduduk dengan mata pencaharian mereka adalah nelayan. Sehingga kehidupan masyarakat nelayan perlu ditingkatkan lagi,

2. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan

Dalam pemerintahan Desa Alor Besar atau kepala pembedayaan masyarakat dan badan musyawarah desa bekerja sama dan saling membantu dalam menyusun rencana peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan berbasis pada perbaikan mutu hidup masyarakat nelayan di Desa Alor Besar, upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan maka menetapkan pokok-pokok pikiran sehingga akan lebih maju, sejahtera dan mandiri. Kerja sama yang pembangunan kesejahteraan masyarakat nelayan akan menghasilkan sebuah kebijakan sebagai berikut:

1. Mengaktifkan kelembagaan UPK
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat nelayan
3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada SDM/perikanan
4. Meningkatkan pemberdayaan aparatur Desa Alor Besar dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan

3. Hambatan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan

Faktor penghambat dalam “PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN” DI DESA ALOR BESAR

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam mensejahterakan masyarakat nelayan di Desa Alor Besar tergolong kurang, dalam hal ini masih banyak masyarakat yang kurang peduli, lebih sibuk bekerja pasrah, merasa tanggung, serta tidak berani menyampaikan pendapatnya atau pengajuan usulan secara langsung sehingga menyebabkan proses mensejahterakan masyarakat nelayan sedikit terhambat.

2. Budaya Malas

Pemerintah Desa Alor Besar telah berupaya memberdayakan masyarakat melalui pemberian pelatihan salah satunya yaitu pelatihan dalam menggunakan alat tangkap. Akan tetapi masyarakat berkali-kali di bekali pengetahuan tentang memfungsikan sumber daya yang sudah ada di Desa Alor Besar dalam hal pemberian alat tangkap, memberikan bantuan berupa mesin perahu motor. tetapi masih belum ada kemajuan dalam tingkat masyarakat nelayan.

3. Ketersediaan Fasilitas

Tidak adanya fasilitas yang mendukung dalam kegiatan rapat Desa Alor Besar maupun penyuluhan dalam perikanan seperti perangkat mesin alat tangkapan ikan modern. Proses penyuluhan serta tempat penangkapan ikan yang belum memadai dalam perencanaan kegiatan mensejahterakan masyarakat nelayan di Desa Alor Besar.

Gambar dalam table Ringkasan Temuan Penelitian:

Aspek Implementasi	Temuan Utama	Dampak
Akses & Penyaluran	Bantuan sampai pada sasaran, distribusi cepat melalui dua lembaga salur	KPM dapat memenuhi kebutuhan dasar
Verifikasi	Pelacakan kelayakan berkala melalui pendamping & RT/RW	Akurasi sasaran meningkat meski belum optimal

Koordinasi	Sinergi lintas pihak berjalan baik	Kelancaran pelaksanaan & komunikasi
Tantangan SDM & Infrastruktur	Pendamping terbatas, fasilitas minim	Pemantauan dan pertemuan tidak merata
Pemahaman KPM	Informasi bantuan belum dipahami menyeluruh	Keluhan & salah tafsir nominal bantuan

4. Implikasi Temuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kelurahan Tanah Tinggi telah berjalan dengan baik, terutama dalam memenuhi fungsi perlindungan sosial dasar dan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Namun, untuk mencapai efektivitas optimal diperlukan: peningkatan kapasitas pendamping, pemutakhiran data berkala yang lebih cepat, penyederhanaan informasi bantuan, serta penguatan mekanisme monitoring berbasis komunitas. PKH berpotensi menjadi instrumen strategis memutus rantai kemiskinan antargenerasi apabila tantangan implementasi pada tingkat lokal tersebut dapat diatasi secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan implementasi kebijakan perlindungan sosial berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menempatkan negara sebagai penanggung jawab pemenuhan hak warga atas perlindungan sosial. Melalui skema bantuan bersyarat, PKH tidak hanya berfungsi mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dalam jangka pendek, tetapi juga diarahkan sebagai investasi sosial jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kelurahan Tanah Tinggi pada tahun 2023 telah berjalan secara umum dengan baik, tercermin dari penyaluran bantuan yang tepat sasaran, koordinasi lintas pihak yang solid, serta mekanisme verifikasi dan monitoring yang melibatkan pendamping sosial dan unsur komunitas setempat. PKH terbukti memberi manfaat nyata bagi keluarga penerima dalam memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan akses terhadap layanan sosial, serta memberikan rasa aman finansial secara berkala.

Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitasnya, antara lain keterbatasan jumlah pendamping dibandingkan cakupan penerima, fasilitas pelaksanaan yang belum memadai, serta pemahaman KPM yang belum merata mengenai mekanisme dan besaran bantuan. Selain itu, proses pemutakhiran data DTKS yang berjalan lambat berdampak pada ketidaksinkronan penerima aktual dengan kondisi sosial ekonomi terkini.

Dengan demikian, efektivitas implementasi PKH di tingkat lokal dapat terus ditingkatkan melalui penguatan kapasitas pendamping, perbaikan sarana pendukung, percepatan pemutakhiran data, serta penyederhanaan dan perluasan akses informasi bagi KPM. Apabila tantangan-tantangan tersebut diatasi secara berkelanjutan, PKH berpotensi semakin optimal sebagai instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial, sekaligus mempertegas peran negara dalam memenuhi hak konstitusional masyarakat miskin dan rentan.

Daftar Pustaka

- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Edwards, G. C. III. (1980). Implementing Public Policy. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). Implementation and Public Policy. Glenview, IL: Scott, Foresman.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2022. Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. (2023). Laporan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun